

MUNGKINKAH AS INVASI IRAN?

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Perkembangan strategis di Timur Tengah pada awal tahun 2007 ini sangat mempengaruhi *State of the Union* dari Presiden Bush yang disampaikan beberapa waktu lalu. Walaupun ditentang keras oleh kalangan DPR yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, pemerintahan Bush tetap bersikukuh berencana akan mengirimkan 21.500 tentara tambahan ke Irak dan akan mencegah dukungan Iran bagi para milisi Irak. Pada saat bersamaan Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice melakukan lawatan diplomatik ke beberapa negara sekutu AS di Timur Tengah termasuk Israel untuk membicarakan kemungkinan implementasi lebih lanjut dari kebijakan Bush tersebut. Secara lugas, dalam kunjungannya ke Israel, Rice menyatakan bahwa salah satu opsi yang dibicarakan adalah kemungkinan melakukan serangan militer ke Iran.

Namun, pemerintahan Iran di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad tidak gentar dengan gerakan-gerakan politik AS tersebut. Bahkan, Mahmoud Ahmadinejad dengan gagah berani melakukan kunjungan kenegaraan ke Nikaragua. Di salah satu negara halaman belakang AS itu, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Presiden Nikaragua Daniel Ortega secara lantang dan terang-terangan menentang setiap langkah imperialisme dari Amerika Serikat. Kunjungan diplomatik Ahmadinedjad ke Nikaragua ini merupakan siasat politik piawai dan heroik yang diterapkan oleh seorang pimpinan bangsa Dunia Ketiga dalam rangka melawan arogansi negara *super power* AS.

Tentu saja AS makin gerah dan geram melihak tingkah laku Iran. Kredibilitas AS sebagai satu-satunya negara super power di era paska Perang Dingin kini sedang dipertaruhkan. Jelas dan nyata Iran telah mencoreng muka Washington. Iran secara telak sudah mencabik-cabik kebijakan halaman belakang AS (*backyard policy*). Tampaknya, balasan yang setimpal dari move-move politik Iran selama ini adalah sebuah penggelaran peningkatan kekuatan militer di Teluk Persia yang setiap saat siap menyerbu Iran kapan saja diperlukan.

Pertanyaannya kini adalah murginkah AS berani melakukan serbuan militer atau menginvasi Iran?. Di lain pihak, apakah siasat politik Iran yang mengedepankan bendera Islam dapat mempersatukan semua bangsa-bangsa Islam untuk menghadapi keadaan konflik

AS-Iran secara konkrit?. Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan membatasi diri dari perspektif strategis baik dari pihak Iran maupun AS.

Revolusi Iran

Sejak tampilnya Ayatullah Khomeini di puncak kekuasaan Iran tahun 1979, revolusi Iran terus menggema ke seluruh dunia. Sejak saat itu Iran berubah dari sebuah negara sekuler menjadi negara Islam. Mayoritas bangsa Iran adalah penganut aliran agama Islam Shiah dan mesjid-mesjid merupakan sentral aktifitas keagamaan dan sosial di Iran. Peranan mesjid bukan saja sebagai tempat membahas permasalahan agama saja, tetapi mesjid juga merupakan berkumpulnya umat yang membicarakan masalah-masalah yang penting, misalnya keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, mesjid-mesjid telah menjadi sarana efektif dalam mengembangkan revolusi Iran.

Dewasa ini pimpinan tertinggi Shiah di Iran dapat dianggap sebagai Imam dan pelindung bukan saja dari seluruh umat Shiah tetapi juga dari kelas-kelas tertindas, seperti umat Islam yang sedang berjuang di berbagai belahan dunia. Kategori kaum tertindas itu belakangan ini juga diperluas pada orang-orang kulit hitam Amerika dan rakyat miskin di dunia, termasuk rakyat miskin di negara-negara Amerika Latin. Maka itu, Iran melihat perangnya melawan imperialisme sebagai melengkapinya revolusi Islamnya. Dalam perspektif ini Amerika Serikat harus dilawan sebagai lambang imperialisme dunia, sekalipun bukan satu-satunya. Karena itu di dalam politik luar negeri Iran melancarkan politik anti imperialisme, anti Amerika Serikat.

Kini setelah lebih seperempat abad revolusi Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad dengan dukungan sepenuhnya dari aparat mullah-mullah diperkirakan akan memunculkan revolusi Islam yang menjalar ke negara-negara tetangga di sekitarnya. Hal itu mungkin saja terjadi apabila menyimak kondisi riil para penganut aliran Shiah tersebar antara lain 30 persen dari penduduk Kuwait, 50 persen dari penduduk Irak, 75 persen dari penduduk Bahrain, 20 persen dari penduduk Abu Dhabi, 30 persen dari penduduk Dubai, 30 persen dari penduduk Qatar, dan 50 persen dari penduduk Oman. Keberadaan para penganut aliran Shiah ini bisa merupakan modalitas dasar revolusi Iran untuk meruntuhkan pengaruh dominan dari Amerika Serikat. Itu berarti juga akan menghancurkan sistem-sistem pembangunan Barat, yang tidak diterima oleh masyarakat luas yang masih memegang nilai-nilai tradisional.

Dengan kata lain, revolusi Iran adalah revolusi sosial yang ditulangi oleh aparat agama Islam aliran Shiah. Tugas bangsa Iran adalah untuk menemukan sebuah formula guna membangun masyarakat yang adil dan makmur serta tidak didominasi oleh pihak-pihak luar, termasuk pihak Barat.

Kaitannya dengan kondisi konflik AS-Iran saat ini, revolusi Iran tampaknya akan makin keras menggemakan sebagai salah satu bentuk revolusi sosial yang akan terus menjalar ke berbagai belahan dunia, seperti ditunjukkan dengan kunjungannya ke wilayah Amerika Latin, dengan satu tujuan menggugat imperialisme AS. Pada titik ini pemerintahan Bush tampaknya perlu secara hati-hati mengantisipasinya.

Opsi-Opsi Amerika Serikat

Di akhir periode pemerintahannya Presiden Bush tampaknya menyadari bahwa nasib politiknya boleh jadi terjalin dengan kelangsungan keterlibatan AS dalam kancah konflik di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia baik konflik dengan milisi Irak maupun dengan Iran. Mengkaji kondisi konflik akhir-akhir ini kiranya hanya terdapat dua opsi yang mungkin perlu diambil pemerintahan Bush yakni: Pertama, opsi militer. Para pengamat meragukan bahwa suatu serangan militer komando AS atas Iran dapat dilakukan dengan kerahasiaan, kecepatan, dan ketepatan yang adikuat serta kemenangan perang maksimal. Hal itu dikarenakan kondisi kekuatan militer Iran berbeda jauh dengan Irak yang hanya dalam jangka waktu dua minggu dapat ditaklukkan AS.

Secara teknologi militer, Iran mungkin jauh di bawah AS. Namun, para mullah di Iran tidak menyandarkan secara penuh kekuatannya militer Iran pada kekuatan teknologi militer semata. Dua dekade terakhir ini para mullah menekankan pada mobilisasi pembangunan *national and character building* bangsa Iran. Mobilisasi para mullah ini telah teruji dalam perang Iran-Irak, membangun ekonomi, politik, dan militer nasional secara mandiri. Kaitannya dengan peperangan militer, maka *jihad fii sabilillah* adalah pijakan hakiki bagi setiap insan militer Iran dalam melawan agresor negara luar. Dengan kata lain, ini menunjukkan karakter musuh yang jauh berbeda dengan musuh-musuh AS sebelumnya.

Apabila kondisi perang antara AS-Iran terjadi, maka terdapat kemungkinan “perang suci” akan terjadi di banyak negaranegara Timur Tengah yang memiliki penduduk militan beragama Islam aliran Shiah. Para simpatisan Iran di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah akan menyerang semua kepentingan-kepentingan AS dan Eropa. Itu berarti pukulan mematikan bagi AS. Dalam jangka waktu lama tidak mustahil pada akhirnya AS akan dipersalahkan sebagai pemicu kondisi perang antar peradaban (Islam dan Kristiani) di Planet Bumi ini.

Kedua, kompromi dengan Iran. Pada permulaan ada petunjuk AS dan Iran akan meminimalisir suasana konflik. Namun, lobi AS yang mendominasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga mengeluarkan resolusi agar Iran menghentikan segala

aktifitas pembangunan nuklirnya telah memicu babak baru perselisihan diantara kedua negara. Kondisi konflik yang awalnya hanya perang retorika menjadi penggelaran kekuatan militer dan diplomasi. AS berposisi untuk tidak melakukan kompromi dengan Iran sebagai salah satu negara poros setan (axis of evil) teroris. Kompromi dengan teroris berarti suatu pukulan bagi martabat Amerika Serikat. Dengan kata lain, cara *win-win solution* perlu dilakukan AS.

Jalan moderat dan tampaknya tidak akan mempermalukan AS yakni dengan menerapkan *two path strategy* seperti yang dilakukan AS terhadap krisis nuklir di Semenanjung Korea. Di kawasan ini AS selain menggelar kekuatan militer juga melibatkan negara-negara kawasan untuk berembuk dalam suatu forum diplomasi multilateral *six party talks*. Strategi ini teruji dapat meminimalisir terjadinya perang terbuka antara pihak yang bertikai karena mungkin AS cukup gentar dengan kemampuan arsenal nuklir jarak jauh Teopodong yang dapat menjangkau daratan AS secara langsung. Perhitungan ini telah memaksa AS untuk membangun penyelesaian diplomasi multilateral enam pihak dan di forum itu AS tampaknya tidak akan kehilangan muka.

Two path strategy bisa saja diterapkan AS terhadap Iran apabila perhitungan strategi menyatakan bahwa resiko yang akan dihadapi AS seperti opsi pertama di atas. Masalahnya, siapkah pemerintahan Bush menerima pilihan pahit ini?. Tampaknya opsi kedua ini yang layak dilakukan Bush di akhir masa jabatannya sehingga Bush tidak akan terkena *impeachment* oleh parlemen AS. Jika tidak, Bush akan menghadapi berbagai tragika-tragika peran menuju akhir yang tragis dari masa kepemimpinannya. Tentu saja ini menarik bagi pelajaran diplomasi kita, bagaimana seorang pemimpin negara dapat menentukan kebijakan negaranya, khusus bagi George W. Bush sebagai pemimpin negara adikuasa yang dapat mengubah konstelasi politik dunia ini.

Dari keseluruhan paparan di atas dapat dimaknakan bahwa krisis AS – Iran sekarang ini kiranya tidak akan meningkat menjadi suatu peperangan, biarpun Pemerintahan Bush meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat di perairan dekat Iran. Walaupun gendang perang keras sekali bunyinya akan tetapi bila diadakan analisa yang lebih mendalam timbul aspek-aspek nonperang, yang lebih menonjolkan perjuangan bangsa-bangsa yang ingin mengembangkan kehidupan yang lebih layak menurut perspektif kepentingan nasionalnya masing-masing.***

=====
Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.